

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang melanda Negara Indonesia, menyebabkan jumlah penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi, jumlahnya semakin lama semakin bertambah dari tahun ke tahun hingga sekarang. Terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia ini juga menyebabkan munculnya berbagai masalah social di masyarakat, antara lain masalah kemiskinan yang memberikan dampak luas pada lingkungan sekitarnya. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah mencapai angka kurang lebih pada 40 juta jiwa (data tahun 2000).¹ Hal ini tentunya menjadi suatu keprihatinan sendiri bagi bangsa Indonesia, mengingat sejak reformasi digulirkan sampai sekarang ternyata para aparat pemerintah belum juga mampu mengatasi secara baik masalah kemiskinan yang melanda Negara Indonesia ini. Karena, suatu kondisi kemiskinan adalah salah satu dari tiga criteria penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Sehingga apabila suatu Negara telah berhasil tumbuh kemakmurannya secara rata-rata namun kemiskinan masih terus menerus

¹ www.bps.go.id – versi Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan UNDP dan UNSFIR (United

dirasakan oleh sebagian penduduknya maka tentunya akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu Negara tersebut telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Salah satu propinsi yang juga terkena dampak krisis moneter tersebut dan juga mengalami peningkatan pada jumlah masyarakat miskinnya adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara absolute, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Yogyakarta selama periode 1999-2003 adalah fluktuatif. Karena pada periode 1999-2000 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dari 789.000 jiwa menjadi 1.036.000 jiwa. Sedangkan pada periode 2001-2002 ditandai dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin, dari 767.600 jiwa menjadi 635.700 jiwa. Sementara pada tahun 2003 jumlah tersebut kemudian meningkat lagi menjadi 636.800 jiwa. Sedangkan untuk wilayah kota Yogyakarta sendiri pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin adalah 303.750 jiwa.² Jumlah ini menunjukkan bahwa setengah dari jumlah total penduduk miskin di Yogyakarta berada di perkotaan dan setengahnya lagi berada di pedesaan.

Untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Yogyakarta terutama yang berada di perkotaan maka Dinas Sosial Propinsi DIY telah melaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan yaitu KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Program dari Dinas Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam semangat kebersamaan untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi. Program KUBE ini dapat dilaksanakan di pedesaan maupun di perkotaan, namun disini hanya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai KUBE perkotaan saja.

Ada beberapa factor yang membedakan antara pelaksanaan kegiatan KUBE perkotaan dengan pelaksanaan KUBE pedesaan, yaitu :

Area dan Jenis Usaha yang dilakukan oleh para KBS dalam kegiatan program KUBE, untuk pelaksanaan kegiatan KUBE perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang lebih sempit daripada di pedesaan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan sebuah jenis kegiatan usaha yang memakan banyak lahan seperti berkebun, beternak dll. Sehingga jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUBE perkotaan lebih mengarah pada usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen yang ada di kota seperti, warung makan, penjahit, bengkel dll.

Program KUBE ini secara tidak langsung juga melatih kemandirian KBS (Keluarga Binaan Sosial) yang menjadi peserta dari program KUBE ini untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

KUBE perkotaan ini lebih memfokuskan pada kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh para KBS (Keluarga Binaan Sosial) di kota Yogyakarta. Jenis usaha yang dilaksanakan oleh para KBS (Keluarga Binaan Sosial) masing-masing dalam satu kelompok sangat tergantung pada ketrampilan dan kemampuannya. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial propinsi DIY ditujukan pada masyarakat miskin di Yogyakarta pada umumnya dan pada kota Yogyakarta pada khususnya.

Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) ini memberikan bantuan bersifat barang-barang berupa sembako ataupun alat-alat rumah tangga yang dapat secara langsung dipergunakan/dimanfaatkan oleh KBS (Keluarga Binaan Sosial), baik itu

sama dengan ketrampilan ataupun kemampuan para KBS. Sehingga nanti diharapkan para KBS yang telah menerima barang bantuan dapat memaksimaikan bantuan tersebut, dan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Sehingga para Keluarga Binaan Sosial dapat hidup secara mandiri dengan bantuan tersebut tanpa harus terus menerus tergantung pada bantuan dari pemerintah baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk mengambil suatu rumusan masalah yaitu *"Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan KUBE di Kota Yogyakarta Tahun 2004?"*

C. Kerangka Dasar Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana serba memiliki keterbatasan hidup dan serba kekurangan dimana orang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara maksimal. Kemiskinan biasanya ditandai dengan suatu sikap bahwa dirinya tidak bisa mengubah nasib agar menjadi lebih baik karena biasanya mereka mempunyai anggapan ataupun pandangan bahwa untuk mengubah kehidupannya dia tidak memiliki modal yang cukup dan memadai untuk memulai

mengubah nasib merupakan hal yang sangat mustahil, sehingga muncul rasa tidak percaya diri yang berlebihan dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Pada prinsipnya, masalah kemiskinan ini merupakan salah satu masalah "klasik" yang dihadapi oleh setiap Negara khususnya untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Masalah-masalah "klasik" tersebut antara lain masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antar pelaku ekonomi, antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antar sector ekonomi. Untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini maka diperlukan adanya kebijaksanaan, komitmen, organisasi, dan program serta pendekatan yang tepat, efektif dan efisien untuk menyentuh sarannya.

Selain itu pula juga diperlukan suatu sikap yang tidak memberlakukan *orang miskin* sebagai objek utama tetapi juga sebagai subjek. *Orang miskin* bukanlah orang yang tidak memiliki sesuatu, tetapi ia memiliki suatu kemampuan walaupun hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Repelita VI, yaitu menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil dan merata.³

Menurut Mubyarto, *kemiskinan* adalah situasi kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh *si miskin* melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan apa pun atau kemampuan yang ada padanya. *Kemiskinan* itu sendiri ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan

2. Karena kesulitan untuk melanjutkan hidupnya karena tidak mendapatkan pekerjaan, atau yang tidak mempunyai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya.
3. Apabila daya beli yang relative rendah, maka hal ini dapat diukur dengan standar kepemilikan uang.
4. Tidak memiliki harta benda sama sekali.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah social sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai social yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia, dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, *kemiskinan* muncul sebagai suatu masalah social. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya, sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. *Kemiskinan* dianggap sebagai masalah social, apabila perbedaan kedudukan ekonomisnya para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Pada masyarakat yang bersahaja, susunan dan organisasinya, mungkin *kemiskinan* bukan merupakan masalah social karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya.

Mereka tidak akan teralau memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Pada masyarakat modern yang rumit, *kemiskinan* menjadi suatu problem social karena sikap yang membenci *kemiskinan* tadi. Seseorang bukan merasa *miskin* karena kurang makan, pakaian atau pun perumahan. Tetapi karena harta yang dimilikinya dianggap tidak cukup untuk memnuhi taraf kehidupan yang ada. Hal seperti ini biasanya terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta ; dimana seseorang dianggap *miskin* karena tidak memiliki radio, televise, ataupun mobil.

Sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut akan dijadikan ukuran bagi keadaan social ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya. Dengan demikian, persoalannya mungkin menjadi lain yaitu tidak adanya pembagian kekayaan yang merata.

Dan persoalan akan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka, pokok persoalan *kemiskinan* disebabkan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga akan muncul tunakarya, tunasusila dan lain sebagainya.

Jika persoalan *kemiskinan* ini dilihat secara *sosiologis* maka sebab-sebab timbulnya problema tersebut adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa *kemiskinan* tersebut.

Secara abstrak, *kemiskinan* adalah suatu keadaan atau kondisi dimana warga

tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya terutama dalam bidang kehidupan fisik jasmaniah yang tidak dapat diatasinya sendiri tanpa memberikan pengaruh kepada orang lain.

Kemiskinan merupakan gambaran riil dari ketidakberdayan dan ketidakberuntungan seseorang dalam perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keadaan tidak berdaya itu mengakibatkan terjadinya hambatan fungsional, kelumpuhan fungsi social, disfungsi social dan ketidakberfungsian social individu dalam kehidupan social.

Kemiskinan dapat terjadi disebabkan factor-faktor penghambat internal maupun eksternal. Negara secara sadar dan sengaja sering melakukan kekeliruan dengan melanggar hak-hak rakyatnya, yang dengan atas nama pembangunan melakukan penggusuran atau membiarkan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan terjadinya *kemiskinan*. Dengan demikian, *kemiskinan* merupakan masalah public yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatasinya oleh masyarakat dan pemerintah.

Kemiskinan, apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. Dalam perspektif naturalistic, mitos/idiologi

Kemiskinan dipandang sebagai kecelakaan sejarah / sesuatu yang tidak terelakkan.

2. Dalam perspektif moralistic

Kemiskinan terjadi disebabkan oleh kejahatan kaum kapitalis dan korupsi secara moral dengan mendistorsi motivasi yang ada pada kaum *miskin* tersebut /

.....

3. Dalam perspektif lingkungan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidaksempurnaan di dalam diri orang *miskin* itu sendiri.

Faktor-Faktor Penyebab *Kemiskinan*, antara lain :

1. Factor *biologis cultural (individual blame approach)*, *Kemiskinan* adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis, maupun cultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya.

Kemiskinan merupakan akibat cacat dan kelemahan individual, dari sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya ketrampilan dan rendahnya kemampuan adaptasi lingkungan, budaya *kemiskinan* dan rendahnya *need for achievement*.

2. Faktor *structural (system blame approach)*, seseorang dapat menjadi *miskin* karena berada pada lingkungan masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut : distribusi penguasaan *resources* yang timpang, gagal dalam mewujudkan pemertaan kesempatan pendidikan, institusi social yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi, perkembangan industri dan teknologi yang kurang membuka peluang kesempatan kerja. Jadi, *kemiskinan* terjadi karena sumber masalah yang berada pada level system / struktur.

Masyarakat, system dan strukturlah yang dianggap sebagai penyebab *kemiskinan* yaitu kondisi social yang mengadirkan berbagai ketimpangan, baik ketimpangan dalam distribusi pendapatan, ketimpangan desa-kota, antarlapisan masyarakat, termasuk antar jenis kelamin

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Suatu pemerintahan yang ingin menanggulangi masalah kemiskinan adalah mutlak. Namun, dalam pelaksanaannya tentulah sulit untuk menemukan cara yang tepat, efektif dan efisien dalam penyelesaiannya. Karena, masalah kemiskinan ini memiliki dampak sosial yang luas. Agar pemerintah mendapatkan strategi yang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan dampaknya ini maka dibutuhkan dua tahap, yaitu :

Tahap pertama, maka dibutuhkan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan mutlak dengan jalan memindahkan sumber-sumber daya kepada kaum miskin, dalam suatu jumlah yang memadai. Pemerintah harus mampu memusatkan perhatian pada isu-isu organisasional yang terlibat dalam suatu strategi pembangunan yang bertujuan untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk menaikkan kaum miskin ke atas garis kemiskinan absolute.

Tahap kedua yang perlu diperhatikan adalah dalam merancang kebijakan-kebijakan maka haruslah disesuaikan dengan strategi swadaya setempat (local self-reliance).⁶

Kemiskinan yang terjadi mutlak harus ditanggulangi, karena menimbulkan banyak dampak social bagi masyarakat miskin itu sendiri baik itu dari aspek ekonomi maupun sosialnya. Dan hal ini berarti pemerintah harus mampu mencari strategi yang efektif untuk dapat meningkatkan pendapatan minimum bagi semua masyarakat miskin.

3. Kesejahteraan

Ada tiga (3) istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu *Kesejahteraan Sosial* (judul bab XIV UUD 1945), *Kemakmuran Rakyat* (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan *Kesejahteraan Rakyat* (nama sebuah kementerian Koordinator). Kebanyakan kita tidak berminat secara serius membahas secara ilmiah perbedaan ke tiga istilah tersebut. Akibat dari keengganan ini jelas yaitu tidak pernah ada kepastian dan ketegasan apa misi social instansi-instansi pemerintah atau kementerian utama yang berada dalam lingkup Menko Kesejahteraan rakyat seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau departemen / kementerian Sosial. Pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri Negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan. Jika kini kita bertanya kepada pakar-pakar ekonomi bagaimana peranan "*Ekonomi Bangsa dalam Upaya Mensejahterakan Rakyat*", maka mayoritas ekonom tidak akan sanggup menjawabnya, kecuali mereka yang tidak lagi percaya pada teori-teori ekonomi Neoklasik Ortodok Barat yang dikuasainya. Selama pakar-pakar ekonomi merasa teori ekonomi kapitalisme-Neoliberal harus tetap dianut Indonesia, lebih-lebih jika mereka berpendapat Indonesia jangan coba-coba melawan kekuatan globalisasi yang dahsyat. Maka tidak mungkin, pakar-pakar ekonomi dapat menemukan resep untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Menghadapi kekuatan globalisasi, banyak diantara pakar ekonomi kita menyarankan saran konyol "*if you can not beat them, join them*". Kita harus sadar bahwa

2

- c. Lantai rumah bukan dari tanah.
- d. Kebutuhan akan kesehatan dapat terpenuhi secara baik (misalnya, jika salah satu anggota keluarganya sakit maka akan segera dibawa ke puskesmas atau dokter).
- e. Anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
- f. Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga dewasa yang berumur 10 s/d 60 tahun.
- g. Anak usia sekolah (7 s/d 15 tahun) bersekolah.

4. Dinas Sosial Propinsi DIY

Dinas Propinsi merupakan unsure pelaksana pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Propinsi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Dinas Propinsi ini mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.⁷

Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah di bidang social dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dan untuk melaksanakan fungsi diatas maka Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan pengendalian di bidang social, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kehidupan beragama, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Rehabilitasi social, serta Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengembangan Kehidupan Beragama.
3. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi social, Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Sumbangan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Kehidupan Beragama.
4. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang social sesuai dengan kewenangannya.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan social lintas kabupaten / kota.
6. memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang social.
7. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi dari Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Bina Program
3. Bidang Rehabilitasi Sosial

4. Bidang Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Pengembangan Sosial
6. Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk Bagian, Bidang, Unit Pelaksana, Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Seorang Tenaga Fungsional Senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Dalam pemaparan kerangka teori mengenai Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya akan dijelaskan mengenai Bidang Kesejahteraan Sosial yang membawahi Bagian Bina Program yang mana menangani dan mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) khususnya untuk wilayah Kota Yogyakarta.

Bagian Bina Program mempunyai fungsi penyusunan program, pengelolaan data, pengembangan system dan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan kinerja Dinas.

Dan untuk melaksanakan fungsi dari Bidang Bina Program itu sendiri maka tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Program Bidang Bina Program.
2. Menyusun program Dinas.

5. KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok warga atau Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang dibentuk oleh warga atau Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS (program kesejahteraan social) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan social dan usaha ekonomi dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu bentuk metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK (Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan) yang merupakan kebijaksanaan untuk melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan.

Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) adalah salah satu komponen Program Keluarga Sejahtera dalam rangka MPMK yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial, disamping Program IDT, TAKESRA, dan KU-KESRA serta program sector terkait lainnya. Untuk tahap awal PROKESOS menggunakan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan social, pelatihan ketrampilan

Sedangkan tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini lebih diarahkan pada suatu upaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara bersama dalam kelompok.
2. Peningkatan pendapatan / penghasilan.
3. Pengembangan usaha.
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan social diantara para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan masyarakat sekitar.⁸

Sedangkan untuk sasaran dari program Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) ini adalah PROKESOS (program kesejahteraan social) dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan social) yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut :

1. keluarga fakir miskin yang dibina melalui Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin.
2. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
3. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
4. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
5. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.

6. Peran

Soekanto mendefinisikan *peranan (role)* sebagai berikut :

“Peranan merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau lembaga yang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.”⁹

Pembedaan antara kedudukan dan *peranan* adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu pula dengan sebaliknya. Tidak ada *peranan* tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa *peranan*. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, *peranan* juga mempunyai dua (2) arti.¹⁰

Setiap orang mempunyai macam-macam *peranan* yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa *peranan* menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya *peranan* adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. *Peranan* menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹¹ Hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara *peranan-peranan* individu dalam masyarakat. *Peranan* diatur dalam norma-norma yang berlaku.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social position*)

⁹ Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, Halaman 220.

¹⁰ www.google.com

merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu *peranan*.

Peranan mungkin mencakup 3 (tiga) hal,¹² yaitu :

1. *Peranan* meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Peranan* dalam arti ini merupakan suatu rangkaian peraturan-pertaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. *Peranan* adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisas{.
3. *Peranan* juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

¹² Levinson. "Role, Personality and Social Structure", dalam Lewis A Coser and Bernard Rosenberg.

6. Peran

Merupakan status seseorang yang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsure penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variable. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana caranya mengukur variable.

1. Indikator keberhasilan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yaitu :
 - a. Meningkatkan taraf kesejahteraan social KBS (Keluarga Binaan Sosial) melalui UEP dan UKS.
 - b. Meningkatkan prinsip-prinsip gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui IKS (Iuran Kesetiakawana Sosial).
 - c. Meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan UEP kelompok.
 - d. Mampu menyisihkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak atau sebagai tambahan modal.

7. M. Meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga

2. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE, yaitu :

- a. Sebagai pembuat kebijakan program KUBE.
- b. Sebagai pemberi modal usaha (fasilitator) dalam pelaksanaan program KUBE perkotaan.
- c. Sebagai Pembina pada proses kegiatan bimbingan motivasi dalam pelaksanaan program KUBE.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE pada masyarakat miskin di kota Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan juga hasil yang didapat oleh keluarga binaan setelah mendapat bantuan dari Dinas Sosial dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi masukan pada pemerintah dalam menentukan program

- b. Membuka lapangan kerja baru dengan adanya usaha bersama ini bagi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagai contoh dan acuan bagi kabupaten atau daerah lain untuk mengikuti keberhasilan pelaksanaan program KUBE ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, dimana dalam penelitian ini bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.¹³ Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai tertujunya pada sesuatu pemecahan masalah yang ada pada masa yang sekarang dengan berusaha mencari pemecahan melalui analisa hubungan sebagai akibat yakni yang meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan sesuatu atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu factor dengan factor yang lain.¹⁴

Ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- 1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual.

¹³ Sunadi Suryobrata, "*Metode Penelitian*", Rajawali, Jakarta, 1992. Halaman 18

¹⁴ Winarno Suralahmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah Metodologi dan Teknik*", Tarsito, Bandung, 1982, Halaman 139-140.

2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Sedangkan tujuan dipergunakannya penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran dari suatu sifat-sifat individual, keadaan gejala, serta yang menerangkannya sebab masalah dari suatu gejala dengan yang lainnya dalam masyarakat.¹⁵

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.1 Data primer

Merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian dengan cara mengamati langsung kegiatan instansi yang mencakup aspek-aspek penelitian.

a. Data atau informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial propinsi DIY mengenai pelaksanaan program KUBE untuk masyarakat miskin di kota Yogyakarta.

b. Data atau informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat miskin di kelurahan gedongkiwo.

1.2 Data sekunder

merupakan data yang didapat dari kajian sumber-sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah yang terkait dengan penelitian. Data yang didapat dari buku-buku, arsip, dan pencarian informasi melalui internet.

¹⁵ Kartini Kartono. "Pengertian Metodologi Riset Sosial", Madan Maju, Bandung, 1990, Halaman 17.

2. Populasi dan Sampel

- *Populasi*, merupakan “*sejumlah subjek yang diperlukan dalam penelitian dan akan diungkap gejala atau kejadian maupun datanya sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan secara generalis pokok permasalahannya*”.¹⁶
- Sedangkan pengertian *sample* adalah “*Representatif atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya*”.¹⁷

Pengambilan sample dalam penelitian ini akan dilakukan pada :

- I. Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
 - a. Orang-orang yang secara langsung menangani program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu dari Bagian Bina Program Seksi Kesejahteraan Untuk Fakir Miskin.
 - b. Sampel dari Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Bagian Bina Program untuk Seksi Kesejahteraan Fakir Miskin akan diambil 3 orang dari staf dari bagian tersebut yang secara langsung menangani program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk kota Yogyakarta.

¹⁶ Mohammad Hasyim, *Penentuan Ke Arah Penelitian Masyarakat*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, Halaman 21

2. Dari masyarakat miskin kota Yogyakarta yang menjadi peserta KBS untuk program KUBE.

- a. Sampel masyarakat miskin kota Yogyakarta yang diambil oleh peneliti adalah masyarakat di kelurahan gedongkiwo, mantrijeron.
- b. Jumlah sample yang diambil adalah 10 KBS dalam satu kelurahan dengan kelompok dan jenis usaha yang berbeda-beda. Dengan demikian akan terlihat variasi pendapatan pada setiap KBS namun tentunya peningkatan pendapatan pada setiap KBS peserta KUBE tidak bisa dikatakan besar karena usaha yang dilaksanakannya pun tergolong kecil.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) akan dilaksanakan di Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan juga di kelurahan gedongkiwo, mantrijeron sebagai bahan observasi langsung. Sehingga nantinya akan diketahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani kesejahteraan masyarakat miskin melalui

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

peserta KUBE dan hasil yang dicapai KBS setelah mendapat bantuan dari Dinas Sosial.

3. Dokumentasi

Data-data yang berasal dari Dinas Sosial tentang tujuan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sampai dengan tahap penyelesaian dari program tersebut sehingga akan terlihat hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut.

H. Tehnik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan baik itu yang bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif kualitatif seperti yang telah dipaparkan diatas